



## **GUBERNUR JAMBI**

### **PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

NOMOR 7 TAHUN 2010

T E N T A N G

### **POLA GADUHAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya melakukan penyebaran dan pengembangan ternak yang dananya disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan baik, perlu memberdayakan masyarakat pengelola/penggaduh ternak secara optimal;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA GADUHAN TERNAK  
PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
4. Ternak adalah semua ternak yang disebarkan kepada petani penggaduh yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.
5. Dana Hasil Setoran adalah dana hasil dari setoran penjualan ternak pemerintah yang ada pada rekening Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi
6. Nilai Ternak Pokok adalah nilai/harga pembelian ternak ketika ternak tersebut diterima oleh penggaduh yang diperhitungkan berdasarkan bobot badan awal ternak yang diterima petani.
7. Laba Usaha adalah nilai/harga penjualan ternak pemerintah setelah dipelihara penggaduh dikurangi dengan nilai ternak pokok, tanpa memperhitungkan biaya yang lain.
8. Gaduhan adalah sistim pola pemberian bantuan berupa pinjaman ternak kepada masyarakat dengan sistim bergulir dan/atau bagi hasil.
9. Penggaduh adalah petani peternak penerima bantuan pinjaman ternak pemerintah daerah.
10. Sistem bagi hasil Ternak Penggemukan adalah sistem penyebaran ternak pemerintah, yang pada awal diterima penggaduh berupa ternak ditimbang bobot badan awal, dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu penggaduh harus menyetorkan nilai ternak pokok sesuai dengan bobot badan ternak awal yang diterimanya.
11. Sistem bagi hasil ternak adalah sistem penyebaran ternak yang dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu penggaduh harus menyetorkan induk yang diterimanya kembali kepada pemerintah daerah.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Hal luar biasa adalah suatu keadaan ternak gaduhan mengalami sakit, kehilangan, kematian dan birahi serta kelahiran.

*BAB II.....*

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat berusaha mengembangkan ternak dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan gaduhan untuk meningkatkan produksi ternak sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pola Gaduhan Ternak meliputi ternak betina bibit yang dikembangbiakan, ternak pejantan bibit atau ternak penggemukan baik berupa sapi, kerbau maupun kambing/domba atau unggas.

## BAB III POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

### Pasal 4

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan dilaksanakan dengan sistem perguliran dan/atau bagi hasil.
- (2) Penyebaran dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan tujuan dan jenis ternak yang digaduhkan.

### Pasal 5

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. ternak betina bibit yang dikembangbiakan;
- b. ternak pejantan bibit;
- c. ternak penggemukan.

### Pasal 6

Perguliran dan atau bagi hasil ternak betina bibit dimaksud Pasal 5 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. penerima seekor sapi atau kerbau harus mengembalikan induk awal kepada pemerintah apabila telah beranak dua ekor dan anak kedua sudah berumur 1 tahun atau lepas sapih bagi penggaduh pertama; sedangkan untuk penggaduh selanjutnya mengembalikan induk apabila telah beranak satu ekor dan sudah berumur 1 tahun atau lepas sapih.
- b. penerima seekor kambing atau domba harus mengembalikan induk awal kepada pemerintah apabila telah beranak tiga ekor dan anak ketiga sudah berumur 6 bulan atau lepas sapih bagi
- c. penggaduh penyebaran pertama; sedangkan untuk penggaduh selanjutnya mengembalikan induk apabila telah beranak 2(dua) ekor dan sudah berumur 6 bulan atau lepas sapih.

### Pasal 7

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak pejantan bibit dimaksud Pasal 5 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. penerima seekor sapi atau kerbau dapat memelihara selama 5 tahun atau lebih atau sampai tidak produktif lagi, selanjutnya ternak tersebut dapat dijual, hasil penjualan untuk petani 80%, sedangkan untuk pemerintah 20%. ditambah harga bobot awal.

*b. penerima.....*

- b. penerima seekor kambing atau domba dapat memelihara selama 5 tahun atau lebih atau sampai tidak produktif lagi, selanjutnya ternak tersebut dapat dijual, hasil penjualan untuk petani 80%, sedangkan untuk pemerintah 20%. ditambah harga bobot awal.

#### Pasal 8

Perguliran dan atau bagi hasil ternak penggemukan dimaksud Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penerimaan satu ekor ternak penggemukan penggadu memelihara selama jangka waktu 12 bulan sampai dengan 24 bulan.
- b. pembagian hasil diperhitungkan dari selisih bobot badan akhir dan bobot badan awal. Selisih bobot badan tersebut dibagi untuk petani 70%, sedangkan untuk pemerintah 30% ditambah harga bobot awal.

### BAB IV

#### PERSYARATAN PENGGADUH

##### Pasal 9

- (1) Syarat-syarat penggadu adalah sebagai berikut :
  - a. mempunyai tempat tinggal tetap.
  - b. sudah berkeluarga.
  - c. mempunyai pengalaman dan ketrampilan memelihara ternak sesuai dengan komoditas yang akan diterima.
  - d. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternaknya dengan baik.
  - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan dan instansi terkait;
  - f. berbadan sehat;
  - g. berkelakuan baik.
- (2) Seleksi calon lokasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Seleksi calon penggadu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

##### Pasal 10

Penggadu berhak atas :

- a. menerima ternak yang ukuran berat dan umur sesuai dengan perjanjian.
- b. menerima bagi hasil yang menjadi bagiannya sesuai dengan surat perjanjian.
- c. memanfaatkan pupuk kandang hasil dari ternak yang diterimanya.

##### Pasal 11

Penggadu berkewajiban untuk:

- a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian.
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik.
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan.
- d. melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu 24 jam kepada petugas peternakan setempat
- e. menyetorkan bagi hasil yang sudah di sepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditanda tangani

*BAB VI .....*

BAB VI  
PENYERAHAN TERNAK

Pasal 12

- (1) Penyerahan ternak kepada penggadu dilakukan dengan ikatan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh penggadu dan pejabat Dinas Peternakan Provinsi Jambi diketahui oleh aparat desa/kelurahan.
- (2) Sebelum ternak diserahkan Dinas Peternakan Provinsi Jambi harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII  
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Apabila penggadu lalai dalam pemeliharaan ternak atau tidak mematuhi ketentuan dalam surat perjanjian, maka ternak dapat dipindahkan kepada penggadu lain tanpa kompensasi.
- (2) Apabila penggadu lalai yang mengakibatkan kematian ternak, penggadu wajib mengganti senilai ternak yang mati tersebut kepada Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Apabila ternak yang digemukkan atau ternak betina yang dikembangbiakkan mengalami kematian bukan karena kesalahan/kelalaian penggadu, penggadu dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian dengan menunjukkan bukti berita acara dari dokter hewan/pejabat berwenang..
- (2). Kriteria kematian ternak bukan karena kesalahan atau kelalaian penggadu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. bencana alam.
  - b. penyakit akut seperti thympani dan pneumonia.
  - c. keracunan yang bukan karena kesengajaan.
  - d. kecelakaan yang bukan karena kesengajaan, termasuk mati karena melahirkan.
- (3) Dalam hal ternak mengalami hilang karena dicuri, penggadu bertanggungjawab atas kehilangan tersebut.

Pasal 15

Dalam hal ternak karena penyakit yang diperkirakan tidak dapat disembuhkan, penggadu wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk dijual atau dipotong, hasil penjualan 100% (seratus per seratus) harus disetor ke rekening Bendahara Penerima Dinas Peternakan Provinsi Jambi selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Ternak yang majir/tidak berfungsi atau kelainan alat reproduksi, dinyatakan oleh dokter hewan/petugas berwenang dan ternak harus dijual.
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana tersebut ayat (1), kepada penggadu mendapat bagian 25% (dua puluh lima per seratus) sedangkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) harus disetor ke rekening Bendahara Penerima Dinas Peternakan Provinsi Jambi selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi.

*BAB VIII .....*

BAB VIII  
PENJUALAN TERNAK

Pasal 17

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penjualan Ternak dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Penjualan ternak pemerintah dapat dilaksanakan melalui penjualan langsung dan dibuat Berita Acara penjualan.
- (2) Harga penjualan ternak ditentukan setiap ekor dari masing- masing jenis ternak.
- (3) Hasil penjualan ternak dikurangi hak penggaduh, disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Jambi, selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah dilaksanakan penjualan.

BAB IX  
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN

Pasal 19

- (1) Bendaharawan Penerima dana hasil setoran wajib membuat pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Dana hasil setoran dari penjualan ternak pemerintah yang masuk ke rekening Dinas Peternakan Provinsi Jambi terdiri dari :
  - a. bagi hasil ternak penggemukan 100% nilai ternak pokok ditambah 30% dari laba usaha untuk pemerintah daerah.
  - b. penjualan ternak jantan bibit setelah di pelihara kurang lebih 5 tahun atau tidak produktif lagi ternak tersebut di jual. 100 % nilai pokok ternak dan ditambah 20 % dari laba usaha untuk pemerintah daerah.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi berkordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota serta instansi terkait untuk meningkatkan mutu ternak dan pembinaan terhadap penggaduh.

Pasal 21

Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Penjualan Ternak Pemerintah serta aparat peternakan di lapangan.

Pasal 22

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak pemerintah kepada Gubernur setiap 6 bulan sekali, atau suatu waktu bila diperlukan.

*BAB XI.....*

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Pola gaduhan ternak yang penyediaan dananya diluar anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi dapat menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian.
- (2) Pola gaduhan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa kontrak selesai.

**BAB XII**  
**P E N U T U P**

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 14 April 2010

**GUBERNUR JAMBI**

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 14 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**A. MAKDAMI FIRDAUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 7**